

IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SALO PALAI KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Mudir¹

Abstrak

Mudir, 2016. Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Des Salo Palai. dibawah bimbingan Dr. Muhammad Noor, M.Si sebagai Pembimbing I dan Dini Zulfiani S.Sos., M.Si sebagai pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa salo palai, dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fakto penghambatnya.

Jenis penelitian yang peneliti terapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini difokuskan pada empat kriteria keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan yaitu interaksi, target group, organisasi pelaksana dan kondisi lingkungan. Sedangkan teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Hubermen dan Johnni Saldana (2014).

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Salo Palai tidak berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan karena interaksi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terkadang mengalami diskomunikasi sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dalam melaksanakan program kebijakan, selain itu isi kebijakan atau target group kurang sesuai dengan harapan masyarakat dikarenakan pemerintah hanya memfokuskan pembangunan di bidang pemberdayaan lingkungan fisik sehingga program pemberdayaan perekonomian dan sumber daya manusia sangat minim, sehingga masyarakat tidak bisa mengembangkan perekonomian di desa. Faktor penghambat dalam proses implementasi program Alokasi Dana Desa adalah terletak pada kurangnya pemahaman tentang tugas dan fungsi baik dari aparatur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, Rukun Tetangga dan masyarakat secara umum.

Kata Kunci : Implementasi, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Desa

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia saat ini menggunakan sistem desentralisasi yang berpedoman pada Undang-Undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa, Daerah diberikan hak otonomi seluas-luasnya, hal ini tercantum dalam bab 1 ketentuan umum Pasal 1 Ayat (5) yang menyatakan bahwa, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan daerah bukan hanya sebatas pada tingkatan kabupaten atau kota namun juga lebih ke tingkat paling bawah yaitu Desa. Dalam melaksanakan pembangunan di daerah pedesaan tentunya tidak hanya cukup dengan adanya kebijakan tetapi juga tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu dibutuhkan sumber dana untuk desa agar bisa melaksanakan sendiri pembangunannya, berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa, pendapatan atau sumber keuangan Desa terdiri dari, Pendapatan Asli desa (Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya Masyarakat, Pungutan, Gotong Royong), Pembagian Pajak dan Retribusi Kabupaten, Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Kabupaten atau Alokasi Dana Desa (ADD).

Berangkat dari adanya Alokasi Dana Desa maka Pemerintah Kutai Kartanegara Mengeluarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa. Berdasarkan peraturan tersebut pada BAB V dijelaskan mengenai tatacara penggunaan Dana Alokasi Dana Desa yang termuat dalam Pasal 6 Ayat (1) Penggunaan Dana Alokasi Dana adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional aparatur desa. dan sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Ayat (3) Penggunaan belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30%.

Berdasarkan hasil observasi maka didapatkan beberapa program pemberdayaan lingkungan fisik tidak sesuai dengan keinginan masyarakat seperti pembuatan jalan semenisasi yang ada di RT V, dan pembangunan jembatan, serta sumur bor yang ada di RT VII dan RT II tidak sesuai dengan keinginan masyarakat karena letaknya yang tidak strategis. Permasalahan lain yang terjadi adalah tidak berjalannya Badan Usaha Milik Desa dalam menopang perekonomian desa, hal ini terlihat dari gedung BUMDesa dijadikan gudang penyimpanan.

Oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut maka Penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **Implementasi Program Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara ?

2. Faktor Penghambat dan pendukung Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara ?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana Implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat Implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis.
Diharapkan bahwa hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan serta dapat membandingkan teori dan juga kenyataan di lapangan khususnya bidang Alokasi Dana Desa
2. Segi Praktis
Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Desa Salo Palai agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat dimanfaatkan lebih baik lagi dan sesuai dengan tujuannya. Sebagai bahan acuan bagi para peneliti sebagai referensi dalam mengadakan penelitian khususnya di bidang pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

KERANGKA DASAR TEORI

Pengertian Kebijakan Publik

Sedangkan Menurut Anderson (Luthfi J Kurniawan Hal 2012:20) berpendapat bahwa kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi, yakni pertama titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik adalah berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan bermaksud untuk berperilaku secara serampangan.

Menurut Carl Fredrich (Dalam Leo Agustinus Hal 2012:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud

Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik menyusun kebijakan publik ke dalam beberapa proses. Menurut William Dunn (Budi Winarno Hal 35 :2012) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini para pejabat menempatkan masalah pada agenda publik. sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini sebuah masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Formulasi Kebijakan

Pada Bagian Formulasi Kebijakan, Masalah yang masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. masalah tadi didefenisikan kemudian dicarikan pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai macam alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dalam tahap ini dari sedemikian banyak alternatif yang ada pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan *elite*, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program yang diambil sebagai alternatif pemecahan masalah yang harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

5. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini kebijakan yang telah diambil dan dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu memecahkan masalah dalam hal ini pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Menurut Rwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistiastuti (Hal 2012:20) mengatakan bahwa implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Daniel A Mazmanian dan Paul A. Sebatier (Dalam Scholihin Abdul Wahab (135-136:2012) menjelaskan makna implementasi ini dengan

menyatakan bahwa, memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Model Implementasi Kebijakan

Menurut Model implementasi kebijakan El More dan dkk (dalam Tahir Hal, 92:2014) menjelaskan bahwa pada dasarnya model ini didasari oleh jenis kebijakan yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau masih membutuhkan pemerintah, namun hanya pada tatanan bawah oleh karena itu kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan atau keinginan masyarakat (*publik*) yang menjadi selaku target dari sebuah kebijakan. Jadi Secara garis besar model implementasi tersebut dapat dilihat pada tahapan model implementasi sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat.
- b. Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau masih melibatkan pemerintah.
- c. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat atau publik yang menjadi target.
- d. Prakarsa masyarakat secara langsung.

menurut Smith (dalam Islami 90:2001), implementasi dapat dikatakan sebagai proses atau alur. Model proses atau alur yang dikemukakan oleh Smith ini melihat proses kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai target group. Smith menyatakan bahwa ada empat variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan, yaitu:

1. *Idealized Policy* (pola interaksi)

Pola interaksi yang diidealkan oleh perumus dengan tujuan mendorong target group untuk melaksanakan kebijakan. Dalam suatu organisasi publik, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pemberian informasi kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi keorganisasi lain dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) Baik yang disengaja maupun tidak.

2. Target group

Bagian dari *stakeholders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi yang diinginkan. Adapun yang mempengaruhi kelompok sasaran untuk dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada (1) kesesuaian isi kebijakan dengan harapan mereka; (2) karakteristik oleh masing-masing kelompok sasaran, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia, dan keadaan sosial ekonomi; (3) komunikasi antara pelaksana kebijakan (*implementator*) dengan penerima kebijakan (kelompok sasaran) sehingga jeleknya proses

komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan.

3. *Implementing Organization* (Organisasi Pelaksana)

Pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksana tersebut dapat berupa organisasi ataupun perorangan yang melaksanakan kebijakan di lapangan dengan bertugas sebagai pengelola, pelaksanaan serta pengawasan. Karakteristik lembaga pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan melihat karakteristik lembaga-lembaga pelaksana, maka pembahasan ini tidak lepas oleh struktur birokrasi.

4. *Environmental Factors* (Faktor Lingkungan)

Unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik)

Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Menteri Dalam Negeri, pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara *administrative*, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam

pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Kartasasmita (Azam Awang 2010:45-46) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu bersifat “*people centered participatory, empowering and sustainable*” selama ini paradigma yang paling dominan dalam pembangunan adalah suatu paradigma yang meletakkan negara dalam posisi sentral dalam merencanakan dalam melaksanakan pembangunan.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 169 ayat 1 menyatakan bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Sedangkan Menurut Winarni (Dalam Sulistiayani 2006:79) mengatakan bahwa pada intinya pemberdayaan masyarakat adalah meliputi tiga hal yaitu, pengembangan (*enabling*), memperketat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diartikan bahwa pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi juga terjadi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, hingga dapat diberdayakan hingga mencapai kemandirian.

Defenisi Konsepsional

Berdasarkan teori dan konsep yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis mencoba merumuskan defenisi konsepsional, jadi yang dimaksud dengan Implementasi program Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian proses kegiatan pengembangan dan peningkatan kemampuan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat sesuai dengan fungsinya masing-masing melalui berbagai bentuk program kebijakan dengan memanfaatkan anggaran Alokasi Dana Desa (yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah) secara efektif dan eifisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif (menjelaskan), maksudnya adalah penelitian ini mempelajari permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, hubungan-hubungan, kegiatan, pandangan, serta bagaimana proses yang sedang

berlangsung, serta pengaruh dari suatu masyarakat tanpa harus membandingkan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Fokus Penelitian

Adapun fokus-fokus yang dilaksanakan dalam penelitian ini :

1. Faktor keberhasilan implementasi kebijakan
 1. Pola interaksi
 2. Target Group :
 - a. Kesesuaian isi kebijakan dengan harapan mereka.
 - b. Karakteristik oleh masing-masing kelompok sasaran.
 - c. Komunikasi antara pelaksana kebijakan (*implementor*) dengan penerima kebijakan (kelompok sasaran).
 3. Organisasi pelaksana
 4. Faktor lingkungan
2. Faktor penghambat implementasi program Alokasi Dana Desa di Desa Salo Palai.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pemilihan informasi atas subjek yang dirasakan memiliki banyak pengetahuan tentang informasi yang dibutuhkan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, Artinya bahwa peneliti menunjuk informan yang akan menjadi sumber data yaitu orang yang paling tahu dan punya pengetahuan luas mengenai seputar informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Dalam hal ini untuk memilih informan dari berbagai lembaga yang terdapat di desa penulis menggunakan teknik pengambilan secara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan *sample* dengan cara memilih informan yang mengetahui persis dan ahli di bidangnya yang sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan menggali, mempelajari sumber atau bahan yang diperlukan sebagai landasan penelitian berupa teori dan konsep yang keabsahannya sudah terjamin. Data tersebut dapat diperoleh melalui buku yang berkaitan dengan teori pelayanan publik.

2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

Pengumpulan data, informasi dan bahan secara langsung ke lapangan lokasi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data di lapangan antara lain yaitu :

- a. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pemilihan, pencatatan, dan pengkodean terhadap serangkaian perilaku, gejala-gejala, dan fenomena yang diteliti.
- b. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan dan secara langsung antara observer dengan informan yang diarahkan pada masalah tertentu

secara mendalam dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun peneliti berdasarkan fokus penelitian.

- c. Dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari dan meneliti berbagai dokumen atau arsip yang menyangkut masalah pelaksanaan pelayanan di Puskesmas Muara Rapak Kota Balikpapan.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan alat analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014 : 31-33), antara lain:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan/atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan yang tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Melalui kondensasi data, kita membuat data lebih kuat.

2. Penyajian Data

Menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Meliputi makna yang disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan pola penjelasan secara logis dan metodologi, konfigurasi yang memungkinkan prediksi hubungan sebab akibat melalui hukum empiris. Sehingga data dapat diuji alasan atau keterpercayaannya, kekuatannya, dan *confirmability* validitasnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Salo Palai adalah Desa yang terbentuk pada tahun 1978 dan merupakan salah satu Desa paling awal di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa ini terletak di dekat aliran muara. Kata salo palai sebenarnya berasal dari bahasa bugis yang asal katanya salo dan kulay, karena dahulu disini banyak tumbuh pohon kulay dan juga berada di dekat aliran muara sehingga disitulah awal mula sejarah penamaan Desa Salo Palai. Luas wilayah Desa Salo Palai adalah 9.982 Ha,

Struktur pemerintahan Desa Salo Palai terdiri dari beberapa bagian yang dapat dilihat sebagai berikut :

Kepala Desa : Sadaruddin.K
Sekertaris Desa : Nor Asikin

Bendahara Desa : Titin Prihatin
PPK Desa : Andi M Asdar
Kaur Pemerintahan : Baharuddin
Kaur Pembangunan : Zahrani
Kaur Umum : Yuliana

Kepala Dusun Lembu : Haryadi Dan Yuswanto

Struktur Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekertaris yang dapat dilihat sebagai

1. berikut Ketua : Haryono SH
2. Wakil ketua : Maristah
3. Sekertaris : Ibrahim

Adapun anggota Badan Permusyawaratan Desa Salo Palai terdiri dari 4 anggota yaitu :

1. Darwis D
2. M. Jupri
3. Jumardin
4. Yuliansyah

Hasil Penelitian

Interaksi

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam pelaksanaan program alokasi dana Desa di Desa Salo Palai. Penulis menemukan bahwa interaksi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam melaksanakan sebuah program pemberdayaan masih belum maksimal, hal ini disebabkan pemerintah dalam memberikan sosialisasi atau menyampaikan program hanya terkait dengan program yang akan dilaksanakan serta kurangnya interaksi timbal balik, selain itu tidak ada keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai berapa jumlah dana, apa tujuannya, siapa yang terlibat dan lainnya sehingga masyarakat tidak termotivasi dalam berpartisipasi. Sementara itu sikap apatis masyarakat serta kurangnya keinginan untuk melakukan tanya jawab ke pemerintah juga menjadi permasalahan dalam proses pelaksanaan program, sehingga kebanyakan masyarakat tidak mengetahui apa saja program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Target Group

Isi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dari narasumber dilihat dari aspek isi kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh program yang telah dilaksanakan pemerintah merupakan harapan dan aspirasi masyarakat, hal ini terlihat dari respon masyarakat terhadap program yang dilaksanakan cukup baik, namun penempatan dari setiap program yang dilaksanakan belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga menyebabkan beberapa program pemberdayaan bidang lingkungan fisik seperti jembatan dan jalan beton yang tidak dimanfaatkan bahkan hanya dimanfaatkan untuk jalan ternak. selain itu pemerintah juga kurang

perhatian terhadap pemberdayaan perekonomian, hal ini terlihat dari berbagai program kebijakan yang dilaksanakan hanya mengarah pada lingkungan fisik, seperti pembangunan jembatan, sumur air bor, pembangunan masjid, jalan, pelatihan, bantuan dana operasional dan lainnya, namun pada bidang perekonomian tidak menjadi fokus dalam pemberdayaan pada tahun 2015.

Faktor Komunikasi

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dilihat dari faktor komunikasi, pemerintah dalam hal ini, apabila menyampaikan program yang akan dilaksanakan masih mengalami permasalahan, seperti dalam menjelaskan tujuan dan maksud suatu program terkadang mengalami diskomunikasi dengan masyarakat, sehingga menimbulkan salah persepsi atau beda pandangan antara pemerintah dan masyarakat selaku pelaksana program kebijakan, hal ini berdampak pada kerjasama diantara kedua belah pihak tidak bisa dijalankan dengan baik, sehingga pemerintah mengambil langkah sendiri dalam menjalankan program pemberdayaan agar tidak terjadi kesalahan yang besar.

Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan dengan para pelaksana program maka didapatkan keterangan bahwa selama ini Pemerintah sudah menjalankan fungsi aturan yang berlaku artinya bahwa pemerintah memberikan tanggungjawab kepada masing-masing sesuai dengan amanah dalam undang-undangan hal ini terlihat dari berbagai pernyataan pada wawancara sebelumnya menyatakan bahwa pihak pemerintah, bersama lembaga, RT dan masyarakat selalu melakukan kerjasama atau gotong royong bersama dalam melaksanakan program pemberdayaan di Desa Salo Palai, baik dibidang lingkungan maupun sumber daya manusia namun kehadiran masyarakat masih minim, namun hal ini menimbulkan sedikit perbedaan dari pemerintahan sebelumnya dan sekarang, terlihat dari berbagai respon yang baik dari beberapa masyarakat terhadap pemerintah sekarang. Namun ada beberapa hal yang masih kurang dari pemerintah desa, yaitu kurangnya memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga dalam pelaksanaan program masyarakat ikut ambil bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor Lingkungan

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan berkaitan dengan faktor lingkungan, maka didapatkan keterangan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan program pemberdayaan adalah permasalahan lingkungan sosial dan ekonomi, kebanyakan masyarakat di Desa Salo Palai merupakan tamatan SD bahkan ada yang tidak sekolah serta sebagian belum memahami bahasa indonesia dengan baik, hal ini berdampak pada paradigma berfikir sehingga ada masyarakat yang cenderung tertutup, individual dan hanya menginginkan aspek keuntungan secara langsung dalam melaksanakan sebuah program pemikiran masyarakat terkadang berbeda dengan pemerintah,

maka tidak heran jika dalam hasil pemaparan sebelumnya disebutkan bahwa masyarakat dalam proses pelaksanaan cenderung menginginkan honor dari pada dampak yang ditimbulkan dari program yang telah dilaksanakan sehingga kebanyakan program yang dilaksanakan harus mengeluarkan dana yang cukup besar agar masyarakat mau berpartisipasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta menganalisis data-data yang menjadi faktor pendukung yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari Implementasi Program Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kutai Kartanegara dilihat dari empat faktor keberhasilan yang efektif dalam sebuah implementasi kebijakan kurang berhasil dengan baik disebabkan karena beberapa faktor sebagai berikut :

1. Interaksi
Pemerintah Desa Salo Palai dalam melaksanakan program pemberdayaan selalu melakukan komunikasi dan interaksi dengan di setiap RT dalam setiap pelaksanaan program kebijakan, namun interaksi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat tidak timbal balik dan terbuka, sehingga banyak masyarakat yang kurang mengerti program yang dilaksanakan oleh pemerintah.
2. Target group
Program yang dilaksanakan pemerintah sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat hal ini disebabkan pemerintah selalu melibatkan masyarakat dalam Musrembang namun hanya aspirasi masyarakat di bidang fisik yang direalisasikan selama ini, sehingga fokus pembangunan pemerintah hanya tertuju kepada pembangunan pemberdayaan bidang fisik, dan melupakan kebutuhan mendesak dari warga desa mengenai program bidang pengembangan perekonomian. sehingga tingkat perkembangan perekonomian masyarakat di Desa Salo Palai kurang berkembang dengan baik.
3. Pelaksana
Dalam proses pelaksanaan program kebijakan, pemerintah desa terkadang mengalami kesulitan dalam mengatur dan menggerakkan organisasi kelembagaan desa dikarenakan organisasi kelembagaan serta beberapa RT yang ada di desa saat ini kurang memahami tugas dan fungsinya serta kurangnya keaktifan dari masing-masing pengurus sehingga pemerintah desa selalu membimbing dan berkoordinasi agar pelaksana program dapat berjalan, selain itu masyarakat yang sulit diatur karena kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan berupa honor dalam bekerja, sehingga pemerintah mengambil langkah secara sepihak dalam menentukan masyarakat selaku pelaksana sebuah program kebijakan.
4. Kondisi Lingkungan
Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Salo Palai yang

masih kental dengan individual (kurang pergaulan) serta pemikiran yang kurang maju (hanya memikirkan keuntungan individu), menyebabkan pemerintah kurang mampu untuk mengorganisir dan menerapkan kerjasama dengan baik terhadap warga masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan baik di bidang pemberdayaan fisik, sumber daya manusia maupun ekonomi sehingga partisipasi masyarakat masih minim.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka penulis memberikan saran-saran dan masukan agar Implementasi program Alokasi Dana Desa bisa berjalan dengan efektif dan efisien di Desa Salo Pale. saran-saran dan masukan dari penulis sebagai berikut :

1. Merubah pola interaksi dalam berinteraksi yang selama ini diterapkan menjadi interaksi timbal balik atau terbuka baik masalah tujuan, manfaat maupun dana kepada setiap elemen masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas setiap program, sehingga mempengaruhi masyarakat untuk megeluarkan aspirasinya dalam pelaksanaan program.
2. Diharapkan pemerintah desa dalam menentukan sebuah kebijakan juga melihat kebutuhan masyarakat secara umum, artinya bahwa pemerintah harus membagi fokus pembangunan dalam tiga bagian yaitu, pemberdayaan ekonomi, fisik dan sumber daya manusia. dan tidak hanya memfokuskan pembangunan dibidang fisik dan sumber daya manusia.
3. Melakukan evaluasi setiap tahun dalam rangka melihat sejauh mana lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat berperan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan baik bidang fisik, ekonomi maupun sumber daya manusia, sehingga hasil evaluasi menjadi acuan dalam memperbaiki kinerja masing-masing lembaga dan masyarakat secara umum.
4. Diharapkan pemerintah desa lebih mengedepankan memahami tugas dan fungsi melalui pertemuan khusus setiap lembaga beserta setiap Rukun Tetangga (RT) dan masyarakat sehingga setiap lembaga dan masyarakat memahami tugas dan fungsinya dengan baik sehingga dapat berpartisipasi dalam menopang pembangunan di pedesaan. Selain itu pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dari masyarakat selaku warga desa.
5. Pemerintah diharapkan memberdayakan Badan Usaha Milik Desa untuk menunjang pembangunan perekonomian desa untuk mewujudkan peningkatan penghasilan dan perekonomian masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita dan Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan Ke III. Bandung: Alfabeta.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erwan Agus Dan Raih Dyiah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia)*. Cetakan Pertama. Jogjakarta: Gava Media..
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Policy Analysis*. Cetakan Pertama. Jogjakarta: Edisi Pertama.
- Kurniawan Luthfi 2012. *Perihal Negara Hukum Dan Kebijakan Publik*. Cetakan Kedua. Jl Joyosuko Metro 42 Mlang. Jawa Timur
- Melong, Lexy.I. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles.Mathew,BA, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif Penerjemah Rohendi Rohidi*, Jakarta: UI Press.
- Munir, Dasril Dan Kk. 2004. *Kebijakan Dan Manajemen Keuangan.Daerah*. Yogyakarta: Ypapi.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan*. Jakarta: Pt Gelora Aksara Erlangga.
- Putra, Fadilah.2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik:Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik Dalam Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 2010. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan rd*. Catakan ke 11. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, edy. 2006. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Remaja rosdakarya.
- Rozaki, Abdur, Dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi Dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Ire Press.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik Dan Transparansipenyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Cetakan Pertama. Alfhabeta..
- William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Ke 2. Cetakan Ke 5. Jogjakarta: Gajah Mada Universiti Press.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik (Teori Dan Proses)*. Cetakan Pertama. Jogjakarta: Media Pressindo.
- _____. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Edisi Revisi. Jl. Kelapa Hijau. Jakarta.
- Wahab, Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan*. Cetakan Ke V. Sinar Grafika Offset. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama. Malang: Umm Pressh.
- _____. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan)*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara .
- Yahdan. Gorris Dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Bandung: Fppd

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005.

Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri, Pasal 1 Ayat 3 Ketentuan Umum.

Peraturan Pemerintah Tentang Desa, Kelurahan, Serta Persyaratan Dan Tatacara Pengangkatan Sekertaris Desa Menadi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2007

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa

Dokumen-Dokumen

Sumber Skripsi

Surianti. 2012. *Implementasi Program Lebaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Sebrang*